

**ANALISIS PERBANDINGAN KETIMPANGAN EKONOMI REGIONAL
PROVINSI DI INDONESIA BARAT DAN INDONESIA TIMUR**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:

Alma Pascaselnofri Amril
NIM. 05951 / 2008

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS PERBANDINGAN KETIMPANGAN EKONOMI REGIONAL
PROVINSI DI INDONESIA BARAT DAN INDONESIA TIMUR**

Nama : Alma Pascaselnofri Amril
Bp/Nim : 2008/05951
Prodi : Ekonomi Pembangunan
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, Juni 2014

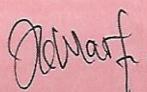
Disetujui Oleh

Pembimbing I



Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S
NIP. 19610502 198601 2 001

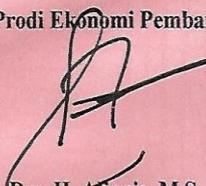
Pembimbing II



Joan Marta, SE, M.Si
NIP. 19830628 20012 1 001

Mengetahui

Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan



Drs. H. Alianis, M.S
NIP. 19591129 198602 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

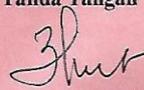
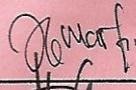
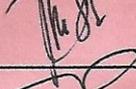
Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

ANALISIS PERBANDINGAN KETIMPANGAN EKONOMI REGIONAL
PROVINSI DI INDONESIA BARAT DAN INDONESIA TIMUR

Nama : Alma Pascaselnofri Amril
Bp/Nim : 2008/05951
Prodi : Ekonomi Pembangunan
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, Juni 2014

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	(Ketua)	Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S	
2.	(Sekretaris)	Joan Marta, SE, M.Si	
3.	(Anggota)	Doni Satria, SE, M.SE	
4.	(Anggota)	Drs. Zul Azhar, M. Si	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alma Pascaselnofri Amril
NIM/Tahun Masuk : 05951/2008
Tempat/ Tgl. Lahir : Padang, 28 November 1989
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Fakultas : Ekonomi
Alamat : By pass Km. 17 Koto Tengah
HP/Telp. : 082174506396/-
Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Ketimpangan Ekonomi Regional
Provinsi di Indoncsia Barat dan Indonesia Timur

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis (skripsi) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademi (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh kerana karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, April 2014

Yang menyatakan



Alma Pascaselnofri Amril
NIM. 05951

ABSTRAK

Alma Pascaselnofri Amril, (2008/05951) : Analisis Perbandingan Ketimpangan Ekonomi Regional Provinsi di Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di bawah bimbingan Ibu Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S dan Bapak Joan Marta, SE, M.Si

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis: (1) Pengaruh investasi terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi di Indonesia Barat dan Indonesia Timur, (2) Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi di Indonesia Barat dan Indonesia Timur, (3) Pengaruh tingkat pendidikan terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi di Indonesia Barat dan Indonesia Timur, (4) Pengaruh investasi, pendapatan asli daerah, dan tingkat pendidikan terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi di Indonesia Barat dan Indonesia Timur.

Penelitian ini menggunakan metode data panel yaitu kombinasi 16 provinsi di Indonesia Barat dan 17 provinsi di Indonesia Timur dari tahun 2010 sampai 2011. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan induktif. Analisis induktif dalam penelitian ini mencakup (1) Analisis regresi panel. (2) Uji T. (3) Uji F.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) investasi berpengaruh positif dengan probabilitas $< \alpha = 0,10$. Pendapatan asli daerah dan tingkat pendidikan juga berpengaruh positif dengan probabilitas $> \alpha = 0,10$. Kontribusi secara bersama-sama dari variabel independent yang digunakan terhadap variabel dependent adalah sebesar 17,6 persen. Sedangkan hasil penelitian untuk ketimpangan pembangunan antar provinsi di Indonesia Timur menunjukkan bahwa (2) investasi, pendapatan asli daerah, tingkat pendidikan menunjukkan nilai probabilitas $> \alpha = 0,10$ terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi di Indonesia Timur, dengan kontribusi secara bersama-sama dari variable independent yg digunakan terhadap variable dependent adalah 1,22 persen.

Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk bisa melakukan kebijakan pembangunan yang memprioritaskan kepada daerah yang relatif tertinggal tanpa mengabaikan daerah yang sudah maju dan tumbuh pesat. Pemerataan di bidang pendidikan dapat dilakukan dengan cara pemberian beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan khususnya yang kurang mampu serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Dan untuk menurunkan angka pengangguran dapat dilakukan dengan cara pembukaan investasi sehingga akan terbukanya kesempatan kerja yang baru dan bagaimana pemerintah dapat memaksimalkan pemanfaatan kekayaan daerah agar dapat meningkatkan dan pemerataan pendapatan asli daerah tiap wilayah. Disarankan untuk peneliti selanjutnya dapat mengkaji faktor-faktor lain yang mempengaruhi ketimpangan ekonomi regional seperti tingkat kesehatan, tenaga kerja, aglomerasi dan jumlah penduduk.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin. Puji Syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **Analisis Perbandingan Ketimpangan Ekonomi Regional Provinsi di Indonesia Barat dan Indonesia Timur**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi pembangunan khususnya kajian ekonomi pembangunan serta untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Terealisasinya skripsi ini tidak terlepas berkat bantuan berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S dan Bapak Joan Marta, SE,M.Si selaku pembimbing I dan II yang telah menyediakan waktunya untuk membimbing dan memberikan saran dalam penyelesaian skripsi ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan dukungan berupa kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana perkuliahan.
2. Bapak Drs. H. Ali Anis, M.S selaku ketua dan Ibu Novya Zulva Riani, SE, M.Si selaku sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi moril dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak dan Ibu staf pengajar serta staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan bantuan pengetahuan dan proses administrasi yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
4. Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat beserta staf dan karyawan yang telah membantu dalam proses pengambilan data skripsi.
5. Dan teristimewa penulis persembahkan kepada ibunda dan ayahanda tercinta serta kakak adik dan anggota keluarga yang telah memberikan do'a dan motivasi yang tak pernah henti-hentinya, demi terealisasinya cita-cita penulis dalam menyelesaikan studi ini dengan cepat.
6. Teman Teman se-angkatan 2008 Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Hanya kepada Allah SWT penulis memohon semoga jasa baik yang telah diberikan dibalas oleh Allah dengan pahala yang setimpal, Amin.....

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari segala kekurangan, untuk itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari pembaca sangat diharapkan. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih.

Padang, April 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal.
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan Penelitian.....	20
D. Manfaat Penelitian.....	21
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN	
A. Kajian Teori.....	22
1. Teori Ketimpangan Ekonomi Regional.....	22
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Ekonomi Regional	29
a. Investasi	29
b. Pendapatan Asli Daerah.....	33
c. Tingkat Pendidikan (APK)	39
B. Temuan Penelitian Sejenis	41
C. Kerangka Konseptual	42
D. Hipotesis	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	46
B. Tempat dan Waktu Penelitian	46
C. Jenis dan Sumber Data	46
D. Variabel Penelitian.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Defenisi Operasional	47
1. Ketimpangan Pembangunan (Y).....	47
2. Investasi (X_1)	48
3. Pendapatan Asli Daerah (X_2)	48
4. Tingkat Pendidikan (X_3)	48
G. Teknik Analisis Data	48
1. Analisis Deskriptif	49
2. Analisis Induktif	49
a. Model Regresi Panel (<i>Pooled Analysis</i>).....	49
b. Uji Asumsi Klasik	53
c. Koefisien Determinasi (R^2)	54
d. Pengujian Hipotesis	55

1) Uji t	55
2) Uji F	56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	59
1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	59
a. Keadaan Geografi Indonesia	59
b. Keadaan Penduduk Indonesia.....	61
2. Deskripsi Variabel Penelitian	62
a. Deskripsi Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi di Indonesia	63
b. Perkembangan Investasi Antar Provinsi di Indonesia	68
c. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Antar Provinsi di Indonesia	71
d. Perkembangan Tingkat Pendidikan (APK) Antar Provinsi di Indonesia.....	74
3. Analisis Induktif	77
a. Analisis Model Regresi Panel Indonesia Barat	77
1) <i>Chow-Test (Likelihood Ratio Test)</i>	77
2) Uji Hausman	78
3) Analisis Model Regresi Panel	78
4) Koefisien Determinan (R²)	81
5) Pengujian Hipotesis	82
a) Uji t	82
b) Uji F	84
b. Analisis Model Regresi Panel Indonesia Timur	85
1) <i>Chow-Test (Likelihood Ratio Test)</i>	85
2) Uji Hausman	85
3) Analisis Model Regresi Panel	86
4) Koefisien Determinan (R²)	89
5) Pengujian Hipotesis	90
a) Uji t	90
b) Uji F	92
B. Pembahasan	92
1. Ketimpangan Pembangunan di Indonesia Barat dan Indonesia Timur	93
2. Pengaruh Investasi Terhadap Ketimpangan Ekonomi Regional Provinsi di Indonesia Barat dan Indonesia Timur.....	95
3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Ketimpangan Ekonomi Regional Provinsi di Indonesia Barat dan Indonesia Timur.....	97
4. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Ketimpangan Ekonomi Regional Provinsi-provinsi di Indonesia Barat dan Indonesia Timur.....	99

5. Pengaruh Investasi, Pendapatan Asli Daerah, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Ketimpangan Ekonomi Regional Provinsi di Indonesia Barat dan Indonesia Timur	102
---	-----

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	103
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal.
3. Data PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi di Indonesia Barat Tahun 2010-2012	4
4. Data PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi di Indonesia Timur Tahun 2010-2012	5
5. Jumlah Penduduk Provinsi di Indonesia Barat Tahun 2010-2012	7
6. Jumlah Penduduk Provinsi di Indonesia Timur Tahun 2010-2012	8
7. Investasi dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi di Indonesia Barat Tahun 2010-2012	10
8. Investasi dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi di Indonesia Timur Tahun 2010-2012.....	13
9. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Provinsi di Indonesia Barat Tahun 2010-2012	16
10. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Provinsi di Indonesia Timur Tahun 2010-2012.....	17
11. Perkembangan Ketimpangan Pembangunan Menurut Provinsi di Indonesia Barat 2010 – 2012	64
12. Perkembangan Ketimpangan Pembangunan Menurut Provinsi di Indonesia Timur 2010 – 2012.....	66
13. Perkembangan Investasi di Indonesia Barat Tahun 2010-2012.....	69
14. Perkembangan Investasi di Indonesia Timur Tahun 2010-2012.....	70
15. Perkembangan PAD di Indonesia Barat Tahun 2010-2012	72
16. Perkembangan PAD di Indonesia Timur Tahun 2010-2012.....	73
17. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar di Indonesia Barat Tahun 2010-2012	75
18. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar di Indonesia Timur Tahun 2010-2012	76

19. Hasil Uji Chow Test Indonesia Barat	78
20. Uji Hausman Indonesia Barat	78
21. Hasil Estimasi Regresi Panel Indonesia Barat	79
22. Hasil Uji Chow Test Indonesia Timur	85
23. Uji Hausman Indonesia Timur	86
24. Hasil Estimasi Regresi Panel Indonesia Timur	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal.
1. Ketimpangan Regional (Hipotesis Neo-Klasik)	23
2. Model Kerangka Konseptual Analisis Pengaruh Investasi, Pendapatan Asli Daerah, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pembangunan	44
3. Perkembangan Indeks Williamson di Indonesia Barat Tahun 2010-2012	65
4. Perkembangan Indeks Williamson Indonesia Timur Tahun 2010-2012	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hal.
25. Ketimpangan (IW), Investasi, Pendapatan Asli Daerah, dan Angka Partisipasi Kasar Provinsi di Indonesia Barat	110
26. Ketimpangan (IW), Investasi, Pendapatan Asli Daerah, dan Angka Partisipasi Kasar Provinsi di Indonesia Timur	112
27. Hasil Data Olahan Indonesia Barat Tahun 2010-2012	114
a. PLS (None)	114
b. FEM	114
c. Chow	115
d. REM	116
e. Hausman	117
28. Hasil Data Olahan Indonesia Timur Tahun 2010-2012	119
a. PLS (None)	119
b. FEM	119
c. Chow	120
d. REM	
e. Hausman	
29. Tabel t	124
30. Tabel F	125

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing – masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu, tidaklah mengherankan bilamana pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (*Development Region*) dan wilayah terbelakang (*Underdevelopment Region*). Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pembangunan Nasional yang telah dilakukan selama ini secara umum telah mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, namun demikian pembangunan tersebut ternyata menimbulkan kesenjangan perkembangan antar Wilayah. Ketimpangan pembangunan terutama terjadi antara Jawa–luar Jawa, antara Kawasan Indonesia Barat meliputi Provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat,

Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur) dan Kawasan Indonesia Timur meliputi Provinsi (Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua).

Sementara itu tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Suatu ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan yang berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya.

Dalam perkembangan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak akan terlepas dari berbagai macam bentuk ketimpangan. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai puncaknya atau daerah yang memiliki tingkat perkembangan maksimal, maka akan mengalirkan perkembangannya tersebut ke daerah yang lain. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan antar daerah tersebut akan semakin mengecil.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Pembangunan mula-mula diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi. Suatu masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Secara sederhana, segenap kegiatan ekonomi baik berupa produksi barang maupun jasa suatu daerah dalam satu satuan waktu (tahun) dapat dijadikan indikator. Dalam hal

demikian, perhitungan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dijadikan acuan.

Perhitungan total PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk tiap-tiap daerah memang menggambarkan kekayaan daerah dari sudut produksi dan kegiatan ekonomi. Namun, belum tentu kekayaan provinsi juga menjadi kekayaan penduduknya, karena tidak semua kegiatan ekonomi dimiliki oleh masyarakat di suatu daerah. Bisa saja suatu daerah hanya menjadi tempat terjadinya kegiatan ekonomi, yang kepemilikannya justru datang dari luar atau sumber daya alam berada didaerah tersebut, namun segala produk dan kegiatan ekonominya diatur oleh korporasi global dan pemerintah pusat. Sehingga hasilnya pun lebih banyak yang ditarik keluar daerah tersebut atau ke pemerintah pusat. Dengan kata lain, manfaat dan alokasi investasi dari keuntungan bagi hasil dan pajak dinikmati oleh pemerintah pusat.

Ini berarti bahwa untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, harus membandingkan pendapatan riil daerah yang bersangkutan dari tahun ke tahun. Indikator yang digunakan adalah PDRB. Dari PDRB, kita dapat melihat seberapa jauh pembangunan telah berhasil mensejahterakan masyarakatnya, dengan kata lain pemerataan pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita. Disini jelas bahwa ada dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu output total (PDRB). Perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi antar daerah atau *region* pada suatu negara, merupakan suatu bentuk dari ketimpangan ekonomi regional. Dimana terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi antar *region* yang

dapat menyebabkan berbagai permasalahan baik masalah ekonomi maupun sosial dan politik yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Berikut ini disajikan tabelnya..

Tabel 1. Data PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi di Indonesia Barat Tahun 2010-2012

Provinsi	PDRB (Milyar)			Laju Pertumbuhan (%)	
	2010	2011	2012	2011	2012
Aceh	33.103	34.789	36.6	5.09	5.21
Sumatera Utara	118.719	126.588	134.464	6.63	6.22
Sumatera Barat	38.862	41.292	43.912	6.25	6.35
Riau	97.736	102.666	106.309	5.04	3.55
Jambi	17.472	18.964	20.374	8.54	7.44
Sumatera Selatan	63.859	68.008	72.094	6.50	6.01
Bengkulu	8.340	8.878	9.464	6.45	6.60
Lampung	38.39	40.859	43.506	6.43	6.48
Bangka Belitung	10.885	11.588	12.251	6.46	5.72
Kep_Riau	41.076	43.81	47.405	6.66	8.21
DKI Jakarta	395.622	422.237	449.821	6.73	6.53
Jawa Barat	322.224	343.111	364.405	6.48	6.21
Jawa Tengah	186.993	198.27	210.848	6.03	6.34
DI Yogyakarta	21.044	22.132	23.309	5.17	5.32
Jawa Timur	342.281	366.983	393.666	7.22	7.27
Banten	88.552	94.207	100	6.39	6.15

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat

Pada Tabel 1, menggambarkan bagaimana bentuk laju pertumbuhan PDRB di Indonesia Barat. Secara keseluruhan provinsi di Indonesia Barat selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, seperti Provinsi Jambi yang memperlihatkan laju pertumbuhan PDRB paling tertinggi di Indonesia barat yaitu pada tahun 2011 sebesar 8,54 persen. Beberapa provinsi memperlihatkan peningkatan yang merata, seperti Provinsi Sumatera Utara, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten yang mengalami peningkatan enam persen setiap tahunnya. Namun, Provinsi Riau memperlihatkan rendahnya

peningkatan PDRB provinsi nya pada tahun 2012 yaitu sebesar 3,55 persen. Perlambatan pertumbuhan ini disebabkan oleh banjir, serangan hama serta berubahnya fungsi lahan pertanian menjadi daerah pemukiman. Untuk melihat bagaimana bentuk perkembangan PDRB Provinsi di Indonesia Timur guna membandingkannya dengan Kawasan Barat Indonesia, berikut adalah tabelnya.

Tabel 2. Data PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi di Indonesia Timur Tahun 2010-2012

Provinsi	PDRB (Milyar)			Laju Pertumbuhan (%)	
	2010	2011	2012	2011	2012
Bali	28.882	30.758	32.804	6.50	6.65
NTB	20.073	19.440	19.221	-3.15	-1.13
NTT	12.547	13.253	13.972	5.63	5.43
Kalimantan Barat	30.329	32.138	34.014	5.96	5.84
Kalimantan Tengah	18.806	20.078	21.42	6.76	6.68
Kalimantan Selatan	30.675	32.553	34.419	6.12	5.73
Kalimantan Timur	110.953	115.476	120.067	4.08	3.98
sulawesi Utara	18.377	19.735	21.287	7.39	7.86
sulawesi tengah	17.624	19.237	21.019	9.15	9.26
Sulawesi selatan	51.200	55.099	59.709	7.62	8.37
Sulawesi Tenggara	11.654	12.698	14.02	8.96	10.41
Gorontalo	2.917	3.141	3.384	7.68	7.74
Sulawesi Barat	4.744	5.233	5.704	10.31	9.00
Maluku	4.251	4.509	4.861	6.07	7.81
Maluku Utara	3.036	3.230	3.445	6.39	6.66
Papua Barat	9.361	11.896	13.781	27.08	15.85
Papua	22.400	21.208	21.436	-5.32	1.08

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan laju pertumbuhan yang tinggi setiap tahunnya yaitu sebesar 27,08 persen pada tahun 2011 dan 15,85 persen di tahun 2012. Pada provinsi di Indonesia Timur terjadi penurunan laju pertumbuhan PDRB oleh Provinsi Papua sebesar -5,32 persen pada tahun 2011. Besarnya dominasi kegiatan PT.

Freeport Indonesia mempengaruhi kegiatan ekonomi Provinsi Papua, terjadinya penurunan laju pertumbuhan karena banyaknya kondisi tanah rawan longsor, kontribusi sector pertambangan nonmigas pun menurun. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua mengalami kontraksi.

Investasi merupakan kunci utama untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tercemin dari kemampuannya meningkatkan laju pertumbuhan dan tingkat pendapatan. Semakin besar investasi suatu Negara akan semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang bias dicapai. Dengan demikina pertumbuhan ekonomi merupakan fungsi investasi. Selain itu investasi juga memperluas kesempatan kerja, mendorong kemajuan teknologi dan spesialisasi dalam produksi sehingga meminimalkan ongkos produksi serta penggalan sumber daya alam, industrialisasi dan ekspansi pasar yang diperlukan bagi kemajuan perekonomian daerah. Ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan merupakan sebuah realita yang ada di tengah-tengah masyarakat dunia ini baik di negara maju maupun negara berkembang, Perbedaannya terletak pada proporsi tingkat ketimpangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Berikut akan disajikan perkembangan jumlah penduduk provinsi di Indonesia Barat dan Indonesia Timur.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Provinsi di Indonesia Barat Tahun 2010-2012

No	Provinsi	Jumlah Penduduk			Pertumbuhan (%)	
		2010	2011	2012	2011	2012
1	Aceh	4494410	4597308	4612373	2.29	0.33
2	Sumatera Utara	12982204	13103596	13215401	0.94	0.85
3	Sumatera Barat	4846909	4904460	4957719	1.19	1.09
4	Riau	5538367	5538367	5929172	0.00	7.06
5	Kep. Riau	1679163	1764766	1847478	5.10	4.69
6	Jambi	3092265	3169814	3242814	2.51	2.30
7	Bengkulu	1715518	1742084	1766794	1.55	1.42
8	Sumatera Selatan	7450394	7593425	7720045	1.92	1.67
9	Bangka Belitung	1223296	1261737	1130921	3.14	-10.37
10	Lampung	7608405	9327445	7767312	22.59	-16.73
11	Banten	10632166	9051185	9857536	-14.87	8.91
12	Jawa Barat	43053732	42993267	44548431	-0.14	3.62
13	DKI Jakarta	9607787	10187595	9869690	6.03	-3.12
14	Jawa Tengah	32382657	32643612	33269207	0.81	1.92
15	DI. Yogyakarta	3457491	3487325	3514764	0.86	0.79
16	Jawa Timur	37476757	37687622	37879713	0.56	0.51

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat

Pada Tabel 3 dapat dilihat jumlah penduduk pada provinsi di Indonesia Barat terjadinya fluktuasi. Laju pertumbuhan penduduk terbesar terdapat pada Provinsi Lampung pada tahun 2011 yakni sebesar 22,59 persen. Bisa dikatakan bahwa banyaknya angka kelahiran pada Provinsi Lampung pada tahun itu. Selanjutnya, provinsi-provinsi di Indonesia Barat menunjukkan angka laju pertumbuhan penduduk yang mendatar, karena tidak menunjukkan kenaikan dan penurunan yang begitu besar. Namun, pada tahun 2011 terdapat besarnya angka penurunan laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Banten sebesar -14,87 persen. Ini karena Provinsi Banten saat ini sedang berada dalam tahapan bonus demografi pada proses transisi demografi yang sedang dijalaninya. Barlangsungnya transisi demografi makin lama makin mengubah wajah

penduduk Banten dengan menggeser distribusi umur penduduk. Proporsi penduduk muda makin menurun, proporsi penduduk usia kerja meningkat pesat dan proporsi penduduk lansia bergerak ke atas secara perlahan. Perubahan komposisi penduduk tersebut tidak terlepas dari adanya intervensi pemerintah pada penurunan angka kelahiran.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Provinsi di Indonesia Timur Tahun 2010-2012

No.	Provinsi	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan (%)	
		2010	2011	2012	2010	2011
1	Bali	3890757	3971259	3686665	2.07	-7.17
2	Nusa Tenggara Barat	4500212	4451392	4587562	-1.08	3.06
3	Nusa Tenggara Timur	4683827	4776485	4899260	1.98	2.57
4	Kalimantan Barat	4395983	4477348	4550297	1.85	1.63
5	Kalimantan Tengah	2212089	2249146	2283687	1.68	1.54
6	Kalimantan Timur	3553143	3681518	3821676	3.61	3.81
7	Kalimantan Selatan	3626616	3695124	3790071	1.89	2.57
8	Sulawesi Utara	2270596	2296666	2326518	1.15	1.30
9	Gorontalo	1040164	1062883	1084192	2.18	2.00
10	Sulawesi Tengah	2635009	2683722	2729227	1.85	1.70
11	Sulawesi Tenggara	2232586	2277020	2323851	1.99	2.06
12	Sulawesi Selatan	8034776	7901240	8214779	-1.66	3.97
13	Sulawesi Barat	1158651	1189203	1218005	2.64	2.42
14	Maluku	1533506	1531379	1608727	-0.14	5.05
15	Maluku Utara	1038087	1035480	1086655	-0.25	4.94
16	Papua Barat	760422	790283	816280	3.93	3.29
17	Papua	2851999	2832615	3152564	-0.68	11.30

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat

Pada Tabel 4 dapat dilihat terjadinya peningkatan laju pertumbuhan penduduk yang tajam pada Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 3,61 persen dan 3,81 persen setiap tahunnya. Ledakan penduduk tersebut memang bukan murni karena factor kelahiran, namun yang sangat menonjol adalah kedatangan perantau yang kebanyakan datang dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Banyaknya perantau yang datang ke Kalimantan Timur karena daerah itu

dianggap menjanjikan untuk memperbaiki nasib atau meningkatkan kesejahteraan. Kemudian pada tahun 2012 peningkatan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia Timur juga ditunjukkan oleh Provinsi Papua yaitu sebesar 11,30 persen. Selanjutnya laju pertumbuhan jumlah penduduk di Provinsi Indonesia Timur tidak begitu menunjukkan peningkatan dan penurunan yang begitu tajam.

Selanjutnya di Indonesia Barat dan Indonesia Timur, Investasi bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang selanjutnya tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga akan pemeratakan dan meningkatkan kesejahteraan nasional secara kontinyu yang disebut sebagai pembangunan ekonomi. Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri dan juga merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah.

Berikut ini akan disajikan data perkembangan investasi dan pendapatan asli daerah provinsi di Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Perkembangan laju pertumbuhan investasi dan pendapatan asli daerah di Indonesia Barat dan Indonesia Timur akan memperlihatkan bagaimana keadaan suatu daerah tersebut dalam menarik investor dan mengelola keuangan daerah pada masing-masing provinsi di Indonesia Barat dan Indonesia Timur.

Tabel 5. Investasi Dan Pendapatan Asli Daerah di Indonesia Barat Tahun 2010-2012

No.	Provinsi	Investasi			Laju		PAD			Laju	
		2010	2011	2012	2011	2012	2010	2011	2012	2011	2012
1	Aceh	41422.50	206125.70	1687394.10	397.62	718.62	355.48	647.45	700.85	82.13	8.25
2	Sumatera Utara	1629738.30	6836978.40	6321973.20	319.51	-7.53	1162.87	1608.44	2700.82	38.32	67.92
3	Sumatera Barat	71142.20	207799.40	735360.30	192.09	253.88	552.99	679.44	807.19	22.87	18.80
4	Riau	780090.70	1932811.30	11295800.10	147.77	484.42	1002.81	1204.98	1144.64	20.16	-5.01
5	Kep. Riau	1490804.10	1993829.70	5259863.80	33.74	163.81	635.10	819.08	848.27	28.97	3.56
6	Jambi	334874.50	178980.40	1532091.60	-46.55	756.01	300.26	324.67	419.11	8.13	29.09
7	Bengkulu	225808.10	390873.90	297759.80	73.10	-23.82	126.93	178.69	191.90	40.78	7.39
8	Sumatera Selatan	1677693.20	5055222.60	7704145.80	201.32	52.40	632.84	747.13	1068.87	18.06	43.06
9	Bangka Belitung	197912.40	1324588.40	580279.10	569.28	-56.19	223.27	224.04	263.51	0.35	17.62
10	Lampung	276449.50	721809.90	1119644.10	161.10	55.12	329.90	358.29	583.77	8.60	62.93
11	Banten	13897475.70	19698539.00	26605843.40	41.74	35.07	1129.06	1289.83	1897.92	14.24	47.15
12	Jawa Barat	15237931.40	34830712.90	41246769.10	128.58	18.42	3640.59	3796.80	5711.22	4.29	50.42
13	DKI Jakarta	57842581.30	43759019.30	40235246.20	-24.35	-8.05	12891.18	17825.29	22040.00	38.28	23.64
14	Jawa Tengah	532459.00	1589812.80	2370806.60	198.58	49.12	3004.66	3184.92	3869.95	6.00	21.51
15	DI Yogyakarta	44090.40	21767.20	831759.70	-50.63	3721.16	515.25	551.91	693.05	7.12	25.57
16	Jawa Timur	15923807.30	11908415.50	22533668.70	-25.22	89.22	3751.64	4669.65	5388.54	24.47	15.39

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat

Investasi merupakan salah satu komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi. Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa ada beberapa provinsi yang mengalami peningkatan laju pertumbuhan investasi yang begitu tajam. Sebagian besar provinsi di Indonesia Barat dapat melirik para investor untuk dapat berinvestasi ke daerahnya. Meningkatnya laju pertumbuhan investasi di Indonesia Barat dikarenakan seiring dengan semakin berkembangnya pasar di Asia, Indonesia juga semakin dilirik oleh negara-negara asing dalam menanamkan investasi. AS, misalnya, yang tahun 2010 lalu terlempar ke posisi 7 dalam jumlah investasi di Indonesia, saat ini bangkit kembali. Pada 2011, AS menempati rangking keempat, setelah Singapura, Jepang, dan Korea Selatan. Turunnya laju pertumbuhan investasi pada provinsi di Indonesia Barat bukan berarti tidak adanya investasi pada daerah tersebut, hanya saja nilai investasi yang diperoleh oleh daerah tersebut sedikit lebih berkurang.

Untuk pendapatan asli daerah provinsi di Indonesia Barat pada tabel 5 menunjukkan laju pertumbuhan pendapatana asli daerah terbesar terdapat pada Provinsi Aceh pada tahun 2011 yaitu sebesar 82,13 persen. Peningkatan ini adalah berkat upaya pemerintah Aceh dalam pendataan pajak yang lebih akurat, peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak, dan kerjasama dengan instansi terkait, serta peningkatan kesadaran dan keterampilan petugas pajak karena pada tahun 2010 jalu pertumbuhan pendapatan asli daerah Provinsi Aceh yang menurun sebesar 27,78 persen. Pada Provinsi Riau terlihat penurunan laju pertumbuhan pendapatan asli daerah sebesar -5,01 persen. Terkait dengan penerimaan dana perimbangan, Pemprov Riau telah berkali-kali

mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk melakukan reka ulang formulasi penentuan dana bagi hasil. Dalam kaitan kebijakan fluktuasi harga minyak dan pengaruhnya terhadap DBH perlu diperjelas oleh pemerintah pusat untuk keterbukaan pemerintah pusat terhadap informasi data, skala, dan besaran sumber dan produksi serta perhitungannya.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat.

Dengan penggalan dan peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah. Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Selanjutnya, bagaimanakah bentuk dari perkembangan investasi dan pendapatan asli daerah provinsi di Indonesia Timur. Pada tabel 6 berikut akan disajikan data perkembangan investasi dan pendapatan asli daerah provinsi di Indonesia Timur.

Tabel 6. Investasi Dan Pendapatan Asli Daerah Di Indonesia Timur Tahun 2010-2012

No.	Provinsi	Investasi			Laju		PAD			Laju	
		2010	2011	2012	2011	2012	2010	2011	2012	2011	2012
1	Bali	2503900.20	4372478.30	4723334.00	74.63	8.02	1730.22	1647.85	2374.27	-4.76	44.08
2	Nusa Tenggara Barat	1985423.40	4218034.20	6226434.80	112.45	47.61	314.13	540.74	601.90	72.14	11.31
3	Nusa Tenggara Timur	34184.90	49880.50	85213.50	45.91	70.84	401.78	497.43	561.51	23.81	12.88
4	Kalimantan Barat	1534090.10	4542252.30	3895528.50	196.09	-14.24	327.74	408.10	626.36	24.52	53.48
5	Kalimantan Tengah	4918922.10	4934191.30	5142916.70	0.31	4.23	282.28	355.93	415.06	26.09	16.61
6	Kalimantan Timur	9833312.50	5468827.80	19729970.60	-44.38	260.77	1093.52	1234.45	1440.57	12.89	16.70
7	Kalimantan Selatan	1821006.20	2469793.20	2670143.70	35.63	8.11	443.56	523.80	617.35	18.09	17.86
8	Sulawesi Utara	2040388.60	1997325.40	458011.60	-2.11	-77.07	233.72	338.03	301.93	44.63	-10.68
9	Gorontalo	7213.50	113374.30	345857.80	1471.70	205.06	88.23	153.41	173.74	73.88	13.25
10	Sulawesi Tengah	1243400.80	3361777.80	7898657.30	170.37	134.95	214.23	264.80	298.38	23.60	12.68
11	Sulawesi Tenggara	125963.20	154232.00	350517.40	22.44	127.27	238.73	397.26	356.85	66.41	-10.17
12	Sulawesi Selatan	3977645.10	816568.70	5707720.70	-79.47	598.99	784.78	1133.34	1291.67	44.42	13.97
13	Sulawesi Barat	336390.80	51005.00	2187.20	-84.84	-95.71	87.68	109.67	93.55	25.08	-14.69
14	Maluku	26088.40	106107.40	83243.90	306.72	-21.55	176.44	183.88	155.58	4.21	-15.39
15	Maluku Utara	2213016.00	1177169.70	884628.40	-46.81	-24.85	122.68	261.14	249.34	112.85	-4.52
16	Papua Barat	154782.50	300231.10	313421.80	93.97	4.39	149.35	174.20	242.44	16.64	39.17
17	Papua	2965259.60	11899905.80	11775157.90	301.31	-1.05	497.37	507.66	685.59	2.07	35.05

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat

Pada Tabel 6 dapat dilihat besarnya laju pertumbuhan investasi pada Provinsi Gorontalo tahun 2011 sebesar 1471,70 persen. Peningkatan laju pertumbuhan di Provinsi Gorontalo diperkirakan terutama terjadi pada penanaman modal asing yang disebabkan oleh peningkatan investasi beberapa investor asing. Melihat besarnya kontribusi investasi masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo mengindikasikan bahwa pelaku investasi memberikan peranan yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi local. Menurunnya laju pertumbuhan investasi di Indonesia Timur banyak terjadi bukan karena tidak adanya investasi pada provinsi tersebut, melainkan karena berkurangnya nilai investasi yang didapat oleh provinsi di Indonesia Timur dari tahun sebelumnya.

Tabel 6 juga menunjukkan laju pertumbuhan pendapatan asli daerah yang sangat tajam pada Provinsi Maluku Utara yaitu sebesar 112,85 persen pada tahun 2011 atas pemaksimalan pengelolaan kekayaan alam yang dimiliki oleh Provinsi Maluku utara seperti *nikel ore*, *limonite*, dan emas, serta potensi laut dan perikanan yang bernilai milyaran dollar membuat peningkatan laju pertumbuhan pendapatan asli daerahnya meningkat tajam dari tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, laju pertumbuhan pendapatan asli daerah yang ada pada provinsi di Indonesia Timur tidak menunjukkan perkembangan yang begitu buruk, hanya saja ada beberapa provinsi yang menunjukkan penurunan laju pertumbuhan pendapatan asli daerah masing-masing provinsi diatas sepuluh persen pada tahun 2012 seperti Provinsi Sulawesi Utara sebesar -10,68 persen,

Sulawesi Tenggara sebesar -10,17 persen, Sulawesi Barat sebesar -14,69 persen, dan Provinsi Maluku yang sedikit lebih tinggi penurunannya yaitu sebesar -15,39 persen.

Untuk melihat pemerataan pendidikan, indikator yang digunakan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). Kegunaan indikator ini adalah untuk mengetahui persentase anak usia sekolah yang bersekolah disuatu jenjang pendidikan tertentu. Kriteria dari APK ialah semakin tinggi angka partisipasi kasar berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah disuatu daerah. Semakin meratanya jumlah penduduk yang bersekolah di tingkat pendidikan yang tinggi, maka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang lebih tinggi, sehingga pada akhirnya dapat menurunkan tingkat ketimpangan.

Kementerian Pendidikan Nasional terus berupaya mencapai target *Education For All* (EFA), yang menjadi tujuan *Millennium Development Goals* (MDGs) tahun 2015, dengan meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) di semua jenjang pendidikan. Saat ini, perhatian lebih difokuskan untuk peningkatan APK di tingkat SMA. Untuk mencapainya, Kemdiknas akan mengupayakan dari sisi pembiayaan atau dana, dan sisi ketersediaan sekolah.

Oleh karena itu, untuk melihat bagaimana perkembangan tingkat pendidikan di Provinsi Indonesia bagian barat berikut disajikan tabelnya selama tahun 2009 hingga tahun 2011.

Tabel 7. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Provinsi di Indonesia Barat Tahun 2010-2012

No.	Provinsi	APK			Rata-Rata
		2010	2011	2012	
1	Aceh	80.96	78.92	77.35	79.08
2	Sumatera Utara	72.69	79.69	80.58	77.65
3	Sumatera Barat	72.82	69.18	72.17	71.39
4	Riau	67.94	71.64	67.24	68.94
5	Kep. Riau	79.63	78.48	71.42	76.51
6	Jambi	63.21	66.23	64.83	64.76
7	Bengkulu	68.83	66.51	65.80	67.05
8	Sumatera Selatan	60.87	63.12	69.00	64.33
9	Bangka Belitung	60.59	60.53	58.39	59.84
10	Lampung	57.81	60.71	61.16	59.89
11	Banten	58.35	59.61	68.55	62.17
12	Jawa Barat	51.37	55.92	64.11	57.13
13	DKI Jakarta	63.14	71.76	74.37	69.76
14	Jawa Tengah	61.61	64.04	66.90	64.18
15	DI Yogyakarta	79.29	86.50	83.09	82.96
16	Jawa Timur	67.06	63.61	67.09	65.92

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat

Tabel 7 menggambarkan angka partisipasi kasar sebagai indikator pendidikan, pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat. Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan di Indonesia Barat dari tahun ke tahun relatif stabil. Rata-rata tingkat pendidikan tertinggi terdapat pada Provinsi DI Yogyakarta yaitu sebesar 82,96 persen dengan kontribusi pada tahun 2010 sebesar 79,29 persen, tahun 2011 sebesar 86,50 persen dan tahun 2012 sebesar 83,09 persen. Hal ini diduga karena DI Yogyakarta merupakan kota pendidikan di Pulau Jawa sehingga pusat pendidikan tertinggi berada di provinsi DI Yogyakarta. Sedangkan tingkat pendidikan terendah terdapat pada Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 57,13 persen dengan kontribusi pada tahun 2010 sebesar 51,37

persen, tahun 2011 sebesar 55,92 persen, dan tahun 2012 sebesar 64,11 persen. Hal ini diduga karena kesadaran masyarakat Jawa Barat akan pendidikan masih rendah.

Tabel 8 berikut akan menjelaskan bagaimana bentuk perkembangan pendidikan di Indonesia Timur.

Tabel 8. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Provinsi di Indonesia Timur Tahun 2010-2012

No.	Provinsi	APK			Rata-rata
		2010	2011	2012	
1	Bali	82.36	84.34	86.47	84.39
2	Nusa Tenggara Barat	62.89	69.24	67.92	66.68
3	Nusa Tenggara Timur	58.95	58.72	59.94	59.20
4	Kalimantan Barat	57.55	52.00	51.67	53.74
5	Kalimantan Tengah	57.61	56.92	59.02	57.85
6	Kalimantan Timur	72.39	73.00	80.08	75.16
7	Kalimantan Selatan	55.75	56.04	66.42	59.40
8	Sulawesi Utara	71.31	75.95	75.7	74.32
9	Gorontalo	61.93	60.60	60.86	61.13
10	Sulawesi Tengah	60.32	65.96	69.73	65.34
11	Sulawesi Tenggara	73.02	72.33	71.32	72.22
12	Sulawesi Selatan	67.71	66.17	73.9	69.26
13	Sulawesi Barat	52.17	61.95	62.76	58.96
14	Maluku	86.92	85.69	82.88	85.16
15	Maluku Utara	74.96	80.61	85.75	80.44
16	Papua Barat	72.91	66.74	70.48	70.04
17	Papua	48.20	47.69	44.48	46.79

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Tabel 8 di atas, dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan di Indonesia Timur dari tahun ke tahun juga relatif stabil. Rata-rata tingkat pendidikan tertinggi terdapat pada Provinsi Maluku yaitu sebesar 85,16 persen dengan kontribusi pada tahun 2010 sebesar 86,92 persen, tahun 2011 sebesar 85,69 persen dan tahun 2012 sebesar 82,88 persen.

Hal ini menandakan keberhasilan upaya Pemerintah Provinsi Maluku untuk meningkatkan mutu pendidikan telah berjalan dengan baik. Sedangkan tingkat rata-rata pendidikan terendah terdapat pada Provinsi Papua yaitu sebesar 46,79 persen dengan kontribusi pada tahun 2010 sebesar 48,20 persen, tahun 2011 sebesar 47,69 persen, dan tahun 2012 sebesar 44,48 persen. Kesadaran masyarakat Papua akan pendidikan sangat jelas kenyatannya terlihat masih rendah dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Indonesia.

Terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah ini selanjutnya membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada wilayah bersangkutan. Biasanya implikasi-implikasi yang ditimbul adalah dalam bentuk kecemburuan dan ketidakpuasan masyarakat yang dapat pula berlanjut dengan implikasi politik dan ketentraman masyarakat. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah ini perlu ditanggulangi melalui formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Perbedaan dalam bentuk faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional yang terjadi di Indonesia Barat dan Indonesia Timur menjadi unsur utama dalam perbedaan tingkat ketimpangan ekonomi regional di Indonesia Barat dan Indonesia Timur, yang ditimbulkan dari tingkat keunggulan dari faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan yaitu perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis, kelancaran mobilitas barang dan jasa, tingkat konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, serta pengalokasian dana pembangunan antar wilayah tersebut. Dimana dari hasil penelitian tersebut akan diambil suatu langkah kebijakan

yang efektif dan efisien dalam pembangunan ekonomi regional disetiap Provinsi di Indonesia Barat dan Indonesia Timur.

Adapun penulis memilih Indonesia Barat dan Indonesia Timur adalah karena penulis menganalisis seberapa besar perbedaan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia Barat dan Indonesia Timur, serta dampak yang ditimbulkannya bagi kesejahteraan antar daerah yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan ekonomi regional antar provinsi semakin besar dan juga menganalisis kelebihan/keunggulan yang dimiliki daerah tersebut, untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi pembangunan pada setiap Provinsi di Indonesia Barat dan Indonesia Timur.

Alasan penulis dalam mengambil daerah penelitian yaitu Indonesia Barat dan Indonesia Timur bertujuan untuk membandingkan agar dapat mengambil implikasi kebijakan yang tepat dalam mengurangi tingkat ketimpangan ekonomi regional antar Indonesia Barat dan Indonesia Timur.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan mengangkat judul : **Analisis Perbandingan Ketimpangan Ekonomi Regional Indonesia Barat Dan Indonesia Timur.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut.

1. Seberapa besar ketimpangan pembangunan antar provinsi di Indonesia Barat dan Indonesia Timur?

2. Sejauhmana pengaruh investasi terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi di Indonesia Barat dan Indonesia Timur?
3. Sejauhmana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi di Indonesia Barat dan Indonesia Timur?
4. Sejauhmana pengaruh tingkat pendidikan terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi di Indonesia Barat dan Indonesia Timur?
5. Sejauhmana pengaruh investasi, pendapatan asli daerah, dan tingkat pendidikan secara bersama-sama terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi di Indonesia Barat dan Indonesia Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Besar ketimpangan pembangunan antar provinsi di Indonesia Barat dan Indonesia Timur.
2. Pengaruh investasi terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi di Indonesia Barat dan Indonesia Timur.
3. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi di Indonesia Barat dan Indonesia Timur.
4. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi di Indonesia Barat dan Indonesia Timur
5. Pengaruh investasi, pendapatan asli daerah, dan tingkat pendidikan secara bersama-sama terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi di Indonesia Barat dan Indonesia Timur.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi pemerintah, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah sebagai bahan dalam pengimplementasian serta pengambilan keputusan kebijakan dalam pengalokasian dana pembangunan di seluruh provinsi Indonesia sesuai dengan kondisi perekonomiannya, sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.
2. Bagi Pengembangan Ilmu Pengentahuan Ekonomi Regional, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Pembangunan.
3. Bagi penulis, sebagai salah satu wadah untuk mengembangkan potensi diri dalam interaksi perekonomian. Terutama dalam mengetahui seberapa besar dampak ketimpangan perekonomian suatu wilayah terhadap pembangunan ekonomi seluruh provinsi di Indonesia.
4. Bagi penelitian lebih lanjut, terutama yang meneliti tentang Ekonomi Regional di Sumatera Barat.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

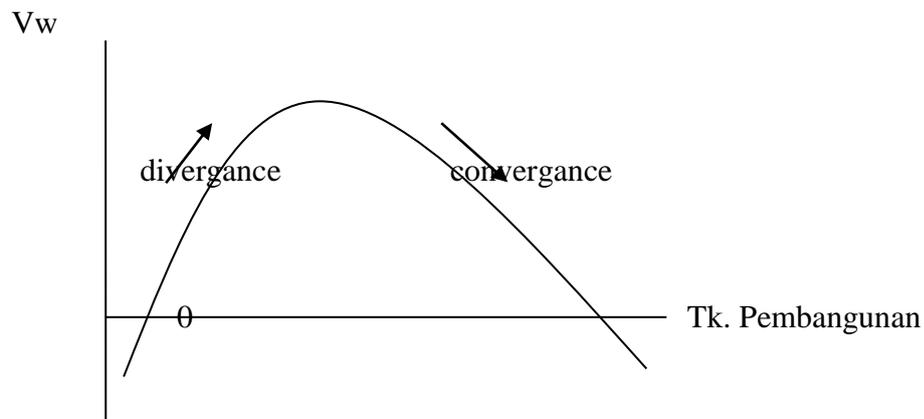
A. Kajian Teori

1. Teori Ketimpangan Ekonomi Regional

Secara teoritis, permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah mula-mula dimunculkan oleh Douglas C. North dalam analisisnya tentang teori pertumbuhan Neo-Klasik. Dalam teori tersebut dimunculkan sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah (Sjafrizal, 2012: 108).

Hipotesis Neo-klasik dalam Sjafrizal (2012: 108) tersebut pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antarwilayah cenderung meningkat (*divergance*). Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun (*convergence*).

Pada permulaan proses pembangunan ketimpangan regional akan meningkat, tetapi setelah melalui titik puncak, bila pembangunan berlanjut terus, maka ketimpangan regional akan mulai menurun.



Gambar 1. Ketimpangan Regional (Hipotesis Neo-Klasik)

Berdasarkan hipotesis ini, dapat ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa pada negara-negara sedang berkembang umumnya ketimpangan pembangunan antarwilayah cenderung lebih tinggi, sedangkan pada negara maju ketimpangan tersebut akan menjadi lebih rendah.

Pada waktu proses pembangunan dilaksanakan di negara sedang berkembang, justru ketimpangan meningkat. Karena, pada waktu proses pembangunan baru dimulai di negara sedang berkembang, kesempatan dan peluang pembangunan yang ada umumnya dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi pembangunan sudah lebih baik. Sedangkan daerah-daerah yang masih sangat terbelakang tidak mampu memanfaatkan peluang ini karena keterbatasan prasarana dan sarana serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hambatan ini tidak saja disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga faktor sosial-budaya sehingga akibatnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat karena pertumbuhan ekonomi cenderung lebih cepat di daerah dengan kondisi yang lebih baik, sedangkan daerah yang terbelakang tidak banyak mengalami kemajuan.

Kebenaran Hipotesis Neo-Klasik ini kemudian diuji kebenarannya oleh Jeffrey G. Williamson pada tahun 1966 melalui suatu studi tentang ketimpangan pembangunan antarwilayah pada negara maju dan negara sedang berkembang dengan menggunakan data *time series* dan *cross-section*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Hipotesis Neo-Klasik yang diformulasikan secara teoritis ternyata terbukti benar secara empirik (Sjafrizal, 2012: 109).

Williamson Index adalah *coefficient of variation* yang lazim digunakan untuk mengukur suatu perbedaan. Istilah Williamson Index muncul sebagai penghargaan pada pengguna awal index tersebut dalam mengukur ketimpangan antarwilayah. Index ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu sensitif terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan, namun index ini lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan antar wilayah.

Williamson Index menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebagai data dasar. Alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antarwilayah dan bukan tingkat distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Dengan demikian, formulasi Indeks Williamson ini secara statistik dapat ditampilkan dengan formula sebagai berikut.

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - y)^2 (f_i/n)}}{y} \quad 0 < V_w < 1 \dots\dots\dots (1)$$

Di mana y_i = PDRB per kapita daerah i
 y = PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah
 f_i = Jumlah penduduk daerah i
 n = Jumlah penduduk seluruh daerah.

Subskrip w digunakan karena formulasi yang dipakai adalah secara tertimbang (*weighted*) agar indeks tersebut menjadi lebih stabil dan dapat dibandingkan dengan negara atau daerah lainnya. Sedangkan pengertian indeks ini adalah sebagai berikut: bila V_w mendekati 1 berarti sangat timpang dan bila V_w mendekati nol berarti sangat merata.

Indeks lainnya yang juga lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah *Theil Index* sebagaimana digunakan oleh Akita dan Alisyahbana (2002) dalam studinya yang dilakukan di Indonesia. Sedangkan data yang diperlukan untuk mengukur indeks ini adalah sama dengan yang diperlukan untuk menghitung *Williamson Index* yaitu PDRB per kapita dan jumlah penduduk untuk setiap wilayah. Demikian pula halnya dengan penafsiran yang juga sama yaitu bila indeks mendekati 1 artinya sangat timpang dan sebaliknya bila indeks mendekati 0 berarti sangat merata. Sedangkan formulasi *Theil Index* (T_d) tersebut adalah sebagai berikut:

$$T_d = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \{y_{ij}/Y\} \log[\{y_{ij}/Y\}/\{n_{ij}/N\}] \dots \dots \dots (2)$$

Di mana:

y_{ij} = PDRB per kapita kabupaten i di provinsi j
 Y = Jumlah PDRB per kapita seluruh provinsi j

n = Jumlah penduduk kabupaten i di provinsi j

N = Jumlah penduduk seluruh kabupaten

Namun demikian, penggunaan *Theil Index* sebagai ukuran ketimpangan ekonomi antarwilayah mempunyai kelebihan tertentu. *Pertama*, indek ini dapat menghitung ketimpangan dalam daerah dan antardaerah secara sekaligus, sehingga cakupan analisis menjadi lebih luas. Dalam kasus Indonesia, dengan menggunakan metode ini dapat menghitung ketimpangan dalam provinsi dan kabupaten/kota serta antarprovinsi, kabupaten dan kota. *Kedua*, dengan menggunakan indek ini dapat pula dihitung kontribusi (dalam persentase) masing-masing daerah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah secara keseluruhan sehingga dapat memberikan implikasi kebijakan yang cukup penting.

Menurut Sjafrizal (2012: 88), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi regional merupakan bagian penting dalam analisa ekonomi regional, karena pertumbuhan merupakan salah satu unsur utama dalam pembangunan ekonomi regional dan mempunyai implikasi kebijakan yang cukup luas. Sasaran utama analisa pertumbuhan ekonomi regional ini adalah menjelaskan mengapa suatu daerah dapat tumbuh dengan cepat dan ada pula yang bertumbuh dengan lambat. Disamping itu, analisis pertumbuhan ekonomi regional juga dapat menjelaskan mengapa terjadi ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah.

Menurut Mydral dalam Arsyad (2004: 304), perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan mengakibatkan

pengaruh yang merugikan (*backwash effects*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effects*) yang dalam hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukannya menurun, sehingga mengakibatkan kesenjangan antar daerah.

Adapun Faktor-faktor utama penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antar propinsi di Indonesia adalah sebagai berikut (Sjafrizal, 2008:117) :

a. Kosentrasi Kegiatan Ekonomi.

Kosentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah. Ekonomi dari daerah dengan kosentrasi kegiatan ekonomi tinggi cenderung tumbuh pesat. Sedangkan daerah dengan tingkat kosentrasi ekonomi rendah akan cenderung mempunyai tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah.

b. Alokasi Investasi.

Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar yang menerangkan adanya korelasi positif antara tingkat investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat perkapita di wilayah tersebut rendah karena tidak adanya kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif seperti industri manufaktur. Berdasarkan penemuan di atas, dapat dibayangkan bahwa apabila selama ini memang ada *transfer of technology, management, know-how* dan input-input positif lainnya yang dibawa oleh PMA, tentu semua ini lebih banyak dinikmati oleh masyarakat dan dunia usaha di Jawa. Oleh karena itu, ketimpangan distribusi investasi antar propinsi dapat dianggap sebagai salah satu faktor utama penyebab ketimpangan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi selama ini antar propinsi di tanah air.

c. Tingkat Mobilitas Faktor Produksi yang Rendah Antar Wilayah.

Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan kapital antarpropinsi juga merupakan penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional. Relasi antara

mobilitas faktor produksi dan perbedaan tingkat pembangunan atau pertumbuhan antarpropinsi dapat jelas dipahami dengan pendekatan analisis mekanisme pasar output dan pasar input. Dasar teorinya adalah sebagai berikut : perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antarpropinsi membuat terjadinya perbedaan tingkat pendapatan perkapita antarpropinsi sejak perbedaan tersebut, dengan asumsi bahwa mekanisme pasar output dan input bebas (tanpa distorsi yang direkayasa, misalnya sebagai akibat dari suatu kebijakan pemerintah, mempengaruhi mobilitas atau (re) alokasi faktor produksi antar propinsi.

d. Perbedaan Sumber Daya Alam Antar Provinsi.

Dasar pemikiran 'klasik' sering mengatakan bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya SDA akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan di daerah yang miskin SDA. Hingga tingkat tertentu, anggapan ini masih bisa dibenarkan, dalam arti SDA harus dilihat hanya sebagai modal awal untuk pembangunan yang selanjutnya harus dikembangkan terus. Dan untuk maksud ini, diperlukan faktor-faktor lain diantaranya yang sangat utama adalah teknologi dan SDM. Propinsi-propinsi di Indonesia yang kaya SDA memang masih lebih baik dibandingkan propinsi-propinsi di luar Jawa yang miskin SDA.

e. Kurang Lancarnya Perdagangan Antar provinsi.

Kurang lancarnya perdagangan antardaerah juga merupakan unsur yang juga menciptakan ketimpangan ekonomi regional di Indonesia. Tidak lancarnya intra-trade disebabkan terutama oleh keterbatasan transportasi dan komunikasi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pembangunan disebabkan oleh Kosentrasi Kegiatan Ekonomi, Alokasi Investasi, Tingkat Mobilitas Faktor Produksi yang Rendah Antar Wilayah, Perbedaan Sumber Daya Alam Antar Provinsi, dan Kurang Lancarnya Perdagangan Antar provinsi. Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan perbedaan pembangunan yang terjadi antar wilayah maju dengan wilayah tertinggal atau terbelakang. Ketimpangan dalam perekonomian merupakan suatu fenomena, faktor yang mungkin

menyebabkan ketimpangan adalah struktur sosial ekonomi yang pada umumnya terjadi pada daerah yang sedang berkembang. Oleh karena itu, untuk menghitung tingkat ketimpangan wilayah di gunakan metode indeks Williamson.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Ekonomi Regional

a. Investasi

Salah satu tantangan yang mendasar dihadapi oleh daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke depan adalah meningkatkan investasi karena investasi memiliki peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

Investasi adalah suatu pengeluaran yang dilakukan untuk meningkatkan dan mempertahankan persediaan barang-barang modal. Investasi merupakan komponen utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain besarnya laju pertumbuhannya dicapai dilakukan oleh investasi yang dilakukan.

Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan dana yang cukup besar untuk melaksanakan pembangunan nasional. Kebutuhan dana yang besar tersebut terjadi karena adanya upaya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dari negara-negara maju, baik di kawasan regional maupun kawasan global. Indonesia masih belum mampu menyediakan dana pembangunan tersebut. Disamping berupaya menggali sumber pembiayaan dalam negeri, pemerintah juga mengundang sumber pembiayaan luar negeri, salah satunya adalah Penanaman Modal Asing.

Investasi secara umum berasal dari kata penanaman modal, yang merupakan salah satu komponen untuk menentukan tingkat pengeluaran agregat. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2004: 121).

Investasi merupakan pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi guna mengganti terutama menambah barang dalam perekonomian yang akan digunakan untuk masa yang akan datang. Dari segi permintaan investasi merupakan selisih pembelian barang modal baru dengan penjualan barang modal yang telah dilakukan oleh perusahaan dan pemerintah serta lembaga-lembaga swasta nirlaba atau dengan kata lain merupakan tambahan netto atas barang modal.

Investasi dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, menurut Keynes dua faktor penting yang menentukan investasi yaitu : suku bunga dan ekspektasi dan masa depan mengenai keadaan kegiatan ekonomi. Disamping ahli-ahli ekonomi menekankan juga kemajuan teknologi sebagai salah satu faktor penting yang menentukan investasi (Soekirno, 2000: 106).

Menurut Harrod-Domar dalam Asryad (1999: 66)

Setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk

mengganti barang-barang modal (gedung, peralatan, material yang rusak). Namun demikian untuk menumbuhkan perekonomian tersebut diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan modal.

Menurut Soekirno (2002: 109), faktor-faktor utama yang mempengaruhi investasi adalah :

1) Tingkat keuntungan yang akan diperoleh

Ramalan mengenai keuntungan masa depan akan memberikan gambaran kepada para pengusaha mengenai jenis-jenis investasi yang mempunyai prospek yang baik untuk dilaksanakan dan besarnya investasi yang harus dilakukan untuk mewujudkan tambahan barang-barang modal yang harus dilakukan untuk mewujudkan tambahan barang-barang modal yang diperlukan.

2) Suku bunga

Suku bunga menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberikan keuntungan kepada para pengusaha dan dapat dilaksanakan. Para pengusaha hanya akan melaksanakan keinginan untuk menanamkan modal apabila tingkat pembelian modal dari investasi yang dilakukan yaitu persentase keuntungan yang akan diperoleh sebelum dikurangi bunga uang yang dibayar, lebih besar dari bunga.

3) Ramalan mengenai keadaan ekonomi masa depan

Dalam menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dikembangkan apakah akan dikembangkan apakah akan memperoleh untung atau menimbulkan kerugian, para pengusaha haruslah membuat ramalan-

ramalan mengenai keadaan masa depan. Ramalan ini menunjukkan bahwa keadaan ekonomi termasuk situasi politik dan keamanan akan menjadi lebih baik lagi pada masa depan, yaitu diramalkan bahwa harga-harga akan tetap stabil dan pertumbuhan pendapatan masyarakat akan berkembang dengan cepat, merupakan keadaan yang akan mendorong investasi.

4) Kemajuan Teknologi

Pada umumnya makin banyak perkembangan teknologi yang dibuat, makin banyak pula kegiatan pembaharuan yang akan dilakukan oleh para pengusaha. Untuk melaksanakan pembaharuan-pembaharuan, para pengusaha harus membeli barang-barang modal yang baru dan adakalanya juga harus mendirikan bangunan-bangunan pabrik atau industri baru. Maka makin banyak pembaharuan yang akan dilakukan, makin tinggi investasi yang akan dicapai.

5) Tingkat pendapatan nasional dan perubahannya

Tingkat pendapatan nasional yang tinggi akan memperbesar pendapatan masyarakat, dan selanjutnya pendapatan masyarakat yang tinggi tersebut akan memperbesar permintaan terhadap barang-barang dan jasa-jasa. Maka keuntungan perusahaan akan tambah tinggi dan ini akan mendorong dilakukannya lebih banyak investasi. dengan kata lain, dalam jangka panjang apabila pendapatan nasional bertambah tinggi maka investasi akan bertambah tinggi pula.

6) Keuntungan perusahaan

Dana investasi diperoleh perusahaan dari meminjam atau tabungannya sendiri. Tabungan perusahaan terutama diperoleh dari keuntungan, semakin besar untungnya semakin besar pula keuntungan yang tetap disimpan perusahaan. Keuntungan yang semakin besar ini memungkinkan perusahaan memperluas usahanya atau mengembangkan usaha baru. Langkah seperti ini akan menambah investasi dalam perekonomian.

Sedangkan menurut Khalwaty (2000: 96) inflasi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam melakukan suatu investasi. Dimana inflasi sangat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam investasi, baik investasi dalam bentuk fisik maupun investasi dalam bentuk surat-surat berharga seperti saham dan obligasi.

b. Pendapatan Asli Daerah

Salah satu penerimaan keuangan daerah adalah pendapatan yang dapat digali oleh daerah itu sendiri yang disebut dengan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan perundang undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan satu indikator untuk menilai tingkat kemandirian daerah dalam bidang keuangan, semakin besar peran pendapatan asli daerah dalam APBD satu daerah maka semakin berhasil pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan.

Menurut Nurcholis (2007: 182), pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Sedangkan Halim (2001: 145) pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah sumber-sumber dari pemerintahannya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Jadi dari pengeertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah penghasilan yang diperoleh melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kas daerah yang berasal dari daerah itu sendiri.

Dalam melaksanakan konsep desentralisasi atau otonomi daerah pendapatan asli daerah merupakan sumber pembiayaan yang memegang peranan penting disamping sumber-sumberpendapatan yang lainnya yang sah menurut perundang undangan. Oleh karena itu system pengelolaan pendapatan asli daerah perlu dirancang sedemikian rupa sehingga pada akhirnya diharapkan terjadi efisiensi dan efektivitas yang tinggi dan meningkatkan pembangunan daerah baik pembangunan fisik maupun pembangunan sosial ekonomi seperti pendidikan dan kesehatan.

Selain itu Halim (2001: 85) menyatakan bahwa dalam rangka melakukan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, sektor pendapatan asli daerah memegang peranan yang sangat penting karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana pemerintah tersebut dapat

membiyai pemerintahan dan pembangunan yang menjadi urusan rumah tangganya yang nantinya akan meningkatkan kinerja daerah tersebut.

Saat ini dengan perubahan paradigma pemerintahan yang ditandai dengan lahirnya undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan undang-undang Nomor 25 tahun 1999, pemerintah pusat mencoba meletakkan kembali arti penting otonomi daerah pada posisi yang sebenarnya, yaitu otonomi adalah kewenangan otonom yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat untuk mengatur prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan. Kewenangan daerah tersebut mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan dibidang lain.

Kewenangan yang begitu luas akan membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu bagi daerah untuk menjalankan kewenangannya itu. Salah satu konsekuensinya adalah bahwa daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintah dan pembangunan yang menjadi kewenangannya. Sejalan dengan hal tersebut Koswara (2000: 5) menyatakan bahwa daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber kewenangannya sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan pada pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga pendapatan asli daerah harus menjadi sumber keuangan terbesar, yang didukung kebijakan perimbangan keuangan

pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Pendapatan asli daerah merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Disamping itu PAD juga mencerminkan kemandirian suatu daerah. PAD merupakan sumber pembiayaan murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Sebagaimana Santoso (1995;20) mengemukakan bahwa PAD merupakan sumber pembiayaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah yaitu :

- 1) Hasil pajak daerah.
- 2) Hasil retribusi daerah.
- 3) Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- 5) Dana perimbangan, yaitu bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan dari sumber daya alam.

- 6) Dana alokasi khusus (DAK).
- 7) Dana alokasi umum (DAU)
- 8) Pinjaman daerah.
- 9) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Jadi dari ketentuan diatas jelas bahwa pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pajak dan retribusi daerah serta hasil usaha daerah itu sendiri. Sedangkan jenis pajak daerah dan retribusi daerah diatur lebih lanjut oleh undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan perubahan dari undang-undang Nomor 18 tahun 1997. Pajak daerah kabupaten kota menurut UU 34/2000 terdiri dari :

- 1) Pajak hotel.
- 2) Pajak restoran.
- 3) Pajak hiburan.
- 4) Pajak penerangan jalan.
- 5) Pajak penggalan bahan galian golongan c.
- 6) Pajak parkir.

Selain jenis pajak daerah diatas dapat ditetapkan jenis pajak daerah lainnya dengan peraturan daerah dengan memenuhi kriteria tertentu, antara lain bersifat pajak dan bukan retribusi, objek pajak berada dalam wilayah kabupaten/kota serta dasar pengenaan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, bukan merupakan objek pajak propinsi atau pajak

pusat, tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, memperlihatkan aspek keadilan dan menjaga kelestarian lingkungan.

Sedangkan retribusi daerah dibagi atas tiga golongan yaitu: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Jenis-jenis ketiga golongan retribusi tersebut ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan kriteria tertentu. Selain jenis retribusi daerah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah tersebut juga dapat ditetapkan retribusi daerah lainnya dengan peraturan daerah sesuai dengan dengan kewenangan otonomi daerah dan memenuhi kriteria daerah yang telah diterapkan.

Salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui pendapatan asli daerah (Sidik, 2002). Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat pendapatan perkapita yang lebih baik. PAD berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi di daerah. PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu.

c. Tingkat Pendidikan (APK)

Menurut tambunan (2009: 2), pentingnya pendidikan tercermin dalam UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga Negara yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan salah satu unsur yang dapat mengubah sikap dan perilaku, meningkatkan dan mengembangkan pola pikir, wawasan serta memudahkan usaha penyerapan informasi yang sifatnya membawa pembaharuan dan kemajuan bagi usahanya. Sedangkan menurut Notoadmodjo (2009: 2) pendidikan adalah suatu upaya untuk mengembangkan potensi manusia, sehingga mempunyai kemampuan untuk mengelola sumber daya alam yang tersedia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya untuk mengukur sejauh mana peran serta lembaga pendidikan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional maka perlu dilakukan analisis terhadap data statistik. Indikator-indikator yang dapat mengindikasikan tingkat keberhasilan pembangunan pendidikan antara lain Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK). Pemerataan dibidang pendidikan dalam penelitian ini menggunakan indikator angka partisipasi kasar (APK).

Angka partisipasi kasar adalah persentase jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan penduduk kelompok usia sekolah. Apabila dalam suatu daerah tingkat tingkat pendidikan merata,

maka selanjutnya diharapkan dapat menurunkan ketimpangan daerah.

Formula untuk menghitung angka partisipasi kasar, yaitu:

$$APK \equiv \frac{\text{jumlah siswa di jenjang pendidikan tertentu}}{\text{jumlah penduduk kelompok usia tertentu}} \times 100\% \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan :

Tingkat SD : kelompok usia 7 - 12 tahun

Tingkat SLTP : kelompok usia 13 - 15 tahun

Tingkat SM : kelompok usia 16 - 18 tahun

Menurut Tarigan (2005: 41), pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi dalam sumber daya manusia. Pendidikan memberikan sumbangan langsung terhadap pertumbuhan pendapatan nasional melalui peningkatan keterampilan dan produktivitas kerja. Pendidikan diharapkan dapat mengatasi keterbelakangan ekonomi lewat efeknya pada peningkatan kemampuan manusia dan motivasi manusia untuk berprestasi. Pendidikan berfungsi menyiapkan salah satu input dalam proses produksi, yaitu tenaga kerja, agar dapat bekerja dengan produktif karena kualitasnya. Hal ini selanjutnya akan mendorong peningkatan output yang diharapkan bermuara pada kesejahteraan penduduk. Kombinasi antara investasi dalam modal manusia dan modal fisik diharapkan akan semakin mempercepat titik singgung antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi adalah produktivitas tenaga kerja (labor productivity). Dengan asumsi bahwa semakin tinggi mutu pendidikan, semakin tinggi produktifitas tenaga kerja dan semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat.

B. Temuan Penelitian Sejenis

Dalam mendukung penelitian yang penulis lakukan maka sangat diperlukan penelitian sebelumnya. Tujuannya agar dapat diketahui apakah penelitian ini sangat berpengaruh dan mendukung atau tidak dalam penelitian sebelumnya. Berikut ini beberapa penelitian sejenis:

1. Penelitian Lilis Masli dengan judulnya "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Antar Kab/Kota Provinsi Jawa Barat". Variabel bebas yang digunakannya adalah PDRB, laju pertumbuhan ekonomi, dan struktur ekonomi, serta data yang dikumpulkan mulai dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2006. Sedangkan metode analisis yang ia gunakan adalah *Indeks Williamson* dan *Indeks Entropi Theil*. Di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi pada periode penelitian menunjukkan arah negatif. Dan tingkat ketimpangan menurut IW cenderung meningkat, penyebabnya adalah perubahan laju pertumbuhan ekonomi yang negatif, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap masalah ketimpangan regional.
2. Penelitian Annisa Ganis Damarjati (2010) yang berjudul "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah". Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ketimpangan Pendapatan, Tingkat Pengangguran, Angka Partisipasi Kasar, dan Aglomerasi. Sedangkan metode analisis yang ia gunakan adalah *Indeks Williamson*. Di mana hasil penelitian

menunjukkan bahwa Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah. Dapat disimpulkan bahwa Hipotesis Kuznets berlaku dalam penelitian ini. Hal ini dapat dilihat dari hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan.

Dari kedua penelitian di atas, yang membedakan dengan penelitian yang penulis buat adalah variabel bebas yang digunakan yaitu investasi, pendapatan asli daerah, dan tingkat pendidikan yang dilihat dari angka partisipasi kasar, di mana data yang dikumpulkan mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2012. Ditambah lagi bahwa dalam penelitian penulis ini membandingkan ketimpangan pembangunan regional di Indonesia Barat dan Indonesia Timur.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan persepsi keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan perumusan masalah. Adapun untuk meneliti pengaruh investasi, pendapatan asli daerah dan tingkat pendidikan terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Indonesia Barat dan Indonesia Timur adalah variabel bebas tiga dan variabel terikat satu, yaitu: ketimpangan pembangunan (Y) sebagai variabel terikat, sedangkan variabel bebasnya yaitu investasi (X_1), pendapatan asli daerah (X_2) dan tingkat pendidikan (X_3).

Pengaruh antara investasi (X_1) dengan ketimpangan pembangunan (Y) adalah positif karena semakin tinggi investasi maka ketimpangan pembangunan akan semakin tinggi. Karena dengan adanya investasi akan

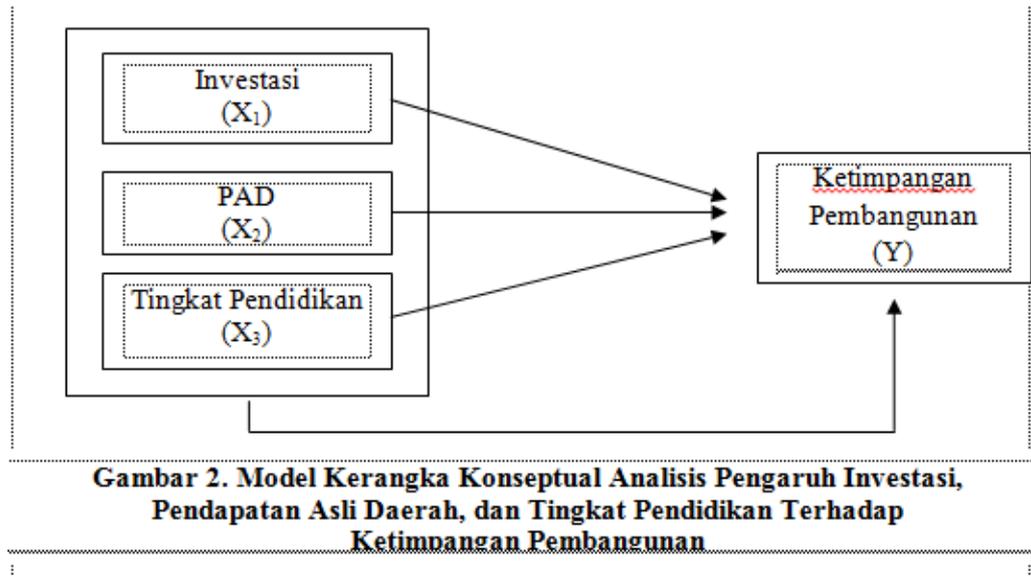
meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah sehingga akan menyebabkan timpangnya dengan daerah lain yang tidak ada investasi atau kurangnya investasi pada daerah itu dan diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan di daerah itu sendiri.

Pengaruh antara pendapatan asli daerah (X_2) dengan ketimpangan pembangunan (Y) adalah positif karena semakin tinggi pendapatan asli daerah maka ketimpangan pembangunan akan semakin tinggi. Apabila pendapatan asli daerah pada suatu daerah tinggi akan menurunkan ketimpangan pembangunan pada daerah itu sendiri dan akan mengakibatkan timpangnya dengan daerah lain.

Dan pengaruh antara tingkat pendidikan (X_3) dengan ketimpangan pembangunan (Y) adalah positif karena jika semakin tinggi persentase penduduk yang pernah sekolah, maka tingkat ketimpangan meningkat. Pada daerah-daerah dimana pekerja yang telah sekolah relatif banyak, ketimpangan distribusi pendapatan relatif rendah. Apabila dalam suatu daerah tingkat pendidikan merata, maka selanjutnya diharapkan dapat menurunkan ketimpangan pembangunan dalam daerah yang bersangkutan.

Kemudian investasi (X_1), pendapatan asli daerah (X_2), serta tingkat pendidikan (X_3) secara bersama-sama mempengaruhi ketimpangan pembangunan daerah. Tetapi, setiap pengaruh dari variabel bisa saja berubah setiap saat, kemungkinan hal itu ada pengaruh dari faktor eksternal yang ikut ambil peran. Oleh karena itu untuk lebih jelasnya dibawah ini disajikan kerangka konseptual sebagai gambaran bagaimana investasi, pendapatan asli

daerah, dan tingkat pendidikan mempengaruhi ketimpangan pembangunan, baik secara parsial maupun secara bersama-sama.



D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Sesuai dengan rumusan masalah dan kajian teori, maka rumusan hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan investasi terhadap ketimpangan pembangunan antar Provinsi di Indonesia Barat dan Indonesia Timur.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

2. Terdapat pengaruh yang signifikan pendapatan asli daerah terhadap ketimpangan pembangunan antar Provinsi di Indonesia Barat dan Indonesia Timur.

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

3. Terdapat pengaruh yang signifikan tingkat pendidikan terhadap ketimpangan pembangunan antar Provinsi di Indonesia Barat dan Indonesia Timur.

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 \neq 0$$

4. Terdapat pengaruh yang signifikan investasi, PAD dan tingkat pendidikan secara bersama-sama terhadap ketimpangan pembangunan antar Provinsi di Indonesia Barat dan Indonesia Timur.

$$H_0 : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \text{salah satu } \beta \neq 0$$

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil olahan data dengan menggunakan analisis regresi panel dan pembahasan terhadap hasil penelitian, antara variabel bebas: investasi, pendapatan asli daerah, tingkat pendidikan terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi di Indonesia Barat dan Indonesia Timur baik secara parsial maupun secara bersama-sama, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Investasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi di Indonesia Barat. Artinya apabila investasi mengalami kenaikan maka akan terjadi peningkatan ketimpangan ekonomi regional di provinsi di Indonesia Barat. Sedangkan di Indonesia Timur pada olahan data yang telah dilakukan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara investasi dengan ketimpangan ekonomi regional di Indonesia Timur.
2. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap ketimpangan ekonomi regional antar provinsi di Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Artinya pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap naik turunnya ketimpangan ekonomi regional di Indonesia Barat dan Indonesia Timur.
3. Tingkat Pendidikan berpengaruh tidak signifikan terhadap ketimpangan ekonomi regional antar provinsi di Indonesia Barat dan Indonesia Timur.

Berarti tingkat pendidikan tidak mempengaruhi bentuk dari ketimpangan ekonomi regional di Indonesia Barat dan Indonesia Timur.

4. Investasi, pendapatan asli daerah dan tingkat pendidikan secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan ekonomi regional antar provinsi di Indonesia Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa investasi, pendapatan asli daerah dan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap ketimpangan ekonomi regional antar provinsi di Indonesia Barat. Sedangkan investasi, pendapatan asli daerah dan tingkat pendidikan di Indonesia Timur secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan ekonomi regional antar provinsi di Indonesia Timur.

B. Saran

Bertitik tolak dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan dari hasil penelitian ini serta kesimpulan yang diperoleh, maka dapat dikemukakan saran-saran berikut:

1. Pentingnya peran media bisnis harian khususnya dalam memberikan informasi terkait iklim investasi di Indonesia, harus dimanfaatkan oleh setiap pemangku kepentingan atau stakeholders untuk menangkap peluang masuknya investor ke Indonesia. Para pemangku kepentingan harus mampu menggandeng media bisnis harian untuk menginformasikan berbagai kemajuan yang telah dicapai pemerintah, khususnya sector-sektor yang mempengaruhi investasi di Indonesia dan disertai dengan memberikan informasi akurat kepada setiap media bisnis

harian. Bahkan memberikan pelatihan kepada para wartawan ekonomi yang ingin memahami berbagai topik perekonomian, sehingga pemberitaan yang disajikan kepada public menjadi tepat guna dan tepat sasaran.

2. Pemerintah harus dapat mengoptimalkan pos-pos penerimaan pendapatan asli daerah agar dapat meningkatkan penerimaan daerah dan kemandirian fiskal sehingga dapat mengurangi ketimpangan celah fiskal. Pemerintah daerah perlu mencari alternatif lain untuk dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tetap melihat kondisi dan potensi daerah yang dimiliki masing-masing daerah, sehingga tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dapat berkurang. Upaya peningkatan PAD harus tetap memperhatikan dampaknya terhadap daya tarik investasi. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah guna meningkatkan PAD, sebaiknya tidak menghambat investasi ke daerah. Selain itu perlu adanya pengawasan dari pemerintah atasannya dan masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana perimbangan sesuai dengan fungsinya sebagai stimulus bagi peningkatan penerimaan PAD.
3. Pemerintah hendaknya lebih mengusahakan pemerataan pendidikan di Indonesia. Pengembangan sektor pedesaan sehingga memperlihatkan peranan pendidikan massal untuk meningkatkan produktivitas sektor pedesaan. Pemerataan distribusi tenaga pendidik khususnya ke daerah-daerah, keadilan dan pemerataan yang menunjukkan pentingnya

distribusi kesempatan memperoleh pendidikan dan bentuk-bentuk pengembangan SDM lainnya baik secara geografis, sosial dan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana untuk khususnya untuk daerah-daerah, pemberian tunjangan dan standar kesejahteraan yang layak untuk kehidupan tenaga pendidik khususnya yang berada di daerah.

4. Ketimpangan ekonomi regional di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh ketiga variabel bebas yang telah penulis teliti, karena masih banyak faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi. Maka, disarankan pada penelitian selanjutnya untuk dapat mengkaji dan meneliti faktor-faktor lain seperti pertumbuhan penduduk, aglomerasi, tenaga kerja dan tingkat kesehatan yang ada diluar variabel bebas yang penulis teliti sehingga dapat diketahui seberapa besar faktor-faktor tersebut mempengaruhi ketimpangan ekonomi regional di Indonesia Barat dan Indonesia Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. *Sumatera Barat dalam Angka 2010*. Jakarta : BPS
- _____. *Sumatera Barat dalam Angka 2011*. Jakarta: BPS
- _____. *Sumatera Barat Angka 2012*. Jakarta: BPS
- _____. *Sumatera Barat Angka 2013*. Jakarta: BPS
- Gujarati, Damodar. 2006. *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi Ketiga*. Terjemah Mulyadi. Jakarta : Erlangga.
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Khalwaty, Tajul. 2000. *Inflasi dan Solusinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi daerah dan Pembangunan daerah: Reformasi, perencanaan, strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2009. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sanjoyo. 2007. *Struktur Data Panel*. <http://mhs.blog.ui.ac.id/sanj55/diskusi-ekonometrik/>.
- Sarwedi. 2002. *Investasi Asing Langsung Di Indonesia dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. <https://www.jurnal.akuntansi.keuangan.com>.
- Sidik, Machfud. 2002. *Kebijakan, Implementasi dan Pandangan Ke Depan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*. Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional: Menciptakan *Good Governance* Demi Mendukung Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal. Yogyakarta, 20 April 2002.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media.
- Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah Dan Perkotaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.